

# PERAN WANITA DALAM EKSISTENSI BUDAYA JAWA PADA MASA ORDE BARU

## THE ROLE OF WOMEN IN THE EXISTENCE OF JAVA CULTURE IN THE NEW ORDER TIME

Lutfia Wirdatul Ajizah

Aulia Fitriany, S.Pd., M.Pd.

Dr. J. Priyanto Widodo, M.Pd.

[lutfia.wirda@gmail.com](mailto:lutfia.wirda@gmail.com)

Program Studi Pendidikan Sejarah

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Persatuan Guru Republik Indonesia Sidoarjo

### ABSTRAK

Ajizah, Lutfia Wirdatul. 2021. *Peran Wanita dalam Eksistensi Budaya Jawa pada Masa Orde Baru*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah. STKIP PGRI Sidoarjo. Dosen Pembimbing : 1) Dr. J. Priyanto Widodo, S.Pd., M.Pd. 2) Aulia Fitriany, S.Pd., M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) peran wanita sebelum hingga saat masa Orde Baru, (2) wujud eksistensi peran wanita dalam budaya Jawa pada masa Orde Baru, (3) dampak dari adanya peran wanita dalam eksistensi budaya Jawa pada masa Orde Baru.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Sumber data yang digunakan merupakan sumber sekunder berupa buku, majalah terbitan tahun kajian, serta jurnal-jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber-sumber sekunder yang ada. Pendekatan yang digunakan penulis untuk dapat memahami hingga mendeskripsikan tentang peranan wanita dalam ekstensi budaya jawa pada masa orde baru adalah pendekatan historis. Selain itu digunakan pula pendekatan sosiologis dengan tujuan dapat mendeskripsikan kehidupan masyarakat jawa dengan ideologi patriarkinya dan terbatasnya wanita di dalamnya.

Hasil penelitian ini adalah : (1) wanita sebelum hingga saat masa Orde Baru memiliki peran penting dalam berbagai hal, baik dalam memperjuangkan kemerdekaan hingga dalam mendukung pembangunan negara pada masa Orde Baru. (2) wujud peran wanita dalam eksistensi budaya Jawa pada masa Orde Baru antara lain adalah ikut dalam pembangunan negara tanpa harus meinggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, hal ini menggambarkan bahwa wanita tetap dalam aturan Jawa yang mengharuskan mengabdikan dalam rumah tangga dan suami disertai dengan pengabdian dalam pembangunan negara. (3) dampak dari adanya peran wanita dalam

eksistensi budaya Jawa pada masa Orde Baru adalah terdapat dampak bagi pendidikan karakter yang ikut mempengaruhi pola kehidupan, baik dampak positif maupun negatif.

*Kata Kunci : Peran Wanita, Budaya Jawa, Orde Baru*

## ABSTRACT

Ajizah, Lutfia Wirdatul. 2021. *Peran Wanita dalam Eksistensi Budaya Jawa pada Masa Orde Baru*. Thesis. History Education Study Program. STKIP PGRI Sidoarjo. Advisor : 1) Dr. J. Priyanto Widodo, S.Pd., M.Pd. 2) Aulia Fitriany, S.Pd., M.Pd.

This study aims to describe: (1) the role of women before the New Order era, (2) the existence of the role of women in Javanese culture during the New Order, (3) the impact of the role of women in the existence of Javanese culture during the New Order.

This research uses literature study method. The data sources used are secondary sources in the form of books, magazines published in the year of study, and scientific journals. The technique of collecting data is by reviewing existing secondary sources. The approach used by the author to understand and describe the role of women in the extension of Javanese culture during the New Order era is a historical approach. In addition, a sociological approach is also used with the aim of being able to describe the life of the Javanese community with its patriarchal ideology and the limited number of women in it.

The results of this study are: (1) women before the New Order era had an important role in various things, both in fighting for independence and in supporting the development of the country during the New Order. (2) the manifestation of the role of women in the existence of Javanese culture during the New Order period, among others, was participating in the development of the country without having to leave their obligations as housewives, this illustrates that women remain under Javanese rules which require serving in the household and husband accompanied by devotion. in the development of the country. (3) the impact of the role of women in the existence of Javanese culture during the New Order era was that there was an impact on character education which also influenced the pattern of life, both positive and negative impacts.

*Keywords : the role of women, Javanese Culture, New Order.*

### **A. Pendahuluan**

Stereotipe perempuan sebagai makhluk kelas kedua terlihat jelas dengan adanya ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwa harkat dan martabat perempuan di bawah laki-laki. Seperti dalam istilah bahasa Jawa, kata 'wanita' berasal dari ungkapan bahasa, yakni *wani* 'berani' dan *tata*

'aturan', yang artinya *wani ing tata* atau dijabarkan dengan luas bahwa seorang wanita Jawa harus dapat mengatur segala sesuatu yang dihadapinua, khususnya di dalam rumah tangga<sup>1</sup>.

Menurut Suryadi, perempuan Jawa adalah lambang kelembutan sekaligus sebagai simbol kekuatan.<sup>2</sup> Kedudukan kaum perempuan dalam kehidupan sosial diatur oleh tradisi; hak dan kewajiban kaum perempuan lebih rendah dibandingkan lelaki<sup>3</sup>. Dalam budaya Jawa, kedudukan perempuan digambarkan dalam istilah *konco wingking*<sup>4</sup>. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan adanya istilah-istilah dan ungkapan dalam budaya Jawa, menjelaskan bahwa perempuan terikat oleh nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat yang tradisional (nilai-nilai budaya Jawa)<sup>5</sup>.

Secara umum, Indonesia menganut budaya patriarki. Ideologi patriarki adalah suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Pada umumnya adalah penguasaan kaum lelaki terhadap kaum perempuan. Menurut Julia, kaum perempuan yang diberi peran sebagai ibu rumahtangga dianggap "tidak produktif", yang tergantung dan menjalankan kerja rumahtangga secara "cuma-cuma"<sup>6</sup>. Di masa Orde Baru yang ditandai oleh dominasi negara di semua segi kehidupan, tentu masuk akal bahwa konstruksi sosial keperempuanan pun dikuasai oleh negara<sup>7</sup>.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana peran wanita sebelum hingga saat masa Orde Baru?

---

<sup>1</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*. (Tangerang: Penerbit Cakrawala, 2003), hlm. 56.

<sup>2</sup> M. Suryadi, *Potret Kekuatan Perempuan Jawa dalam Bingkai Peralatan Tradisional Masyarakat Jawa Pesisir Melalui Analisis Peran Semantis*, Nusa, Vol. 14, No. 1, Februari 2019, hlm. 26

<sup>3</sup> Cora Vreede-de Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan PencapaiannyaI*. (Depok: Komunitas Bambu, 2017), hlm 43.

<sup>4</sup> Dalam Bahasa Jawa, arti dari *konco wingking* adalah teman belakang, dimana dapat dijelaskan maksud dari ungkapan ini adalah perempuan hanya mendapat peran hanya sebatas sebagai "teman belakang" atau teman tidur laki-laki dalam kehidupan berumahrumah tangga.

<sup>5</sup> Atik Catur Budiati, *Aktualisasi Diri Perempuan Dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan terhadap Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri)*, Pamator, Vol. 3 No. 1, April 2010, hlm. 51

<sup>6</sup> Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan*. (Depok: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 1-2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

2. Bagaimana wujud eksistensi peran wanita dalam budaya Jawa pada masa Orde Baru?
3. Bagaimana dampak dari adanya peran wanita dalam eksistensi budaya Jawa pada masa Orde Baru?

### C. Pembahasan

#### 1. Wanita Sebelum masa Orde Baru

##### a. Perjuangan R.A. Kartini dalam Pendidikan Wanita Rembang

Di wilayah Indonesia Barat, khususnya di Aceh terjadi perang Aceh dapat diketahui beberapa tokoh pahlawan yang terkenal perjuangannya dalam medan pertempuran, salah satunya adalah Cut Nyak Din. Di wilayah Indonesia Timur terdapat Martha Christina Tiahahu yang merupakan salah satu pejuang wanita berasal dari Maluku, dengan keberaniannya menghadapi para penjajah. Di wilayah Indonesia bagian tengah, khususnya Jawa, terdapat seorang wanita yang berjuang dalam mencerdaskan anak bangsa dan berusaha mewujudkan kesetaraan antara wanita dan pria dalam bidang pendidikan. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini yang merupakan putri bupati Jepara, RMAA Sosroningrat dengan istri pertamanya Mas Ajeng Ngasirah.<sup>8</sup>

R.A Kartini tumbuh dan hidup dalam lingkungan dengan tradisi bahwa wanita dilarang untuk mengenyam pendidikan. Kemajuan gaya hidup dan pemikiran para bangsawan masa kolonialisme tidak sepenuhnya menjadikan perlakuan masyarakat Jawa pada wanita mengikuti budaya Barat juga. R.A. Kartini yang mendapatkan izin bersekolah di Europeesch Lagere School (ELS), namun tidak mendapatkan izin untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga berakhir dengan lulus dan masuk ke masa pingitannya.<sup>9</sup>

Setelah empat tahun melalui masa pingitannya, Kartini dipinang oleh bupati Rembang pada saat itu, RMAA Djojoadingrat, yang telah memiliki tiga istri.<sup>10</sup> Kartini mengakali perjodohan ini untuk dapat membangun sekolah wanita dengan memanfaatkan akses dari calon suaminya yang merupakan seorang bupati. Beruntungnya Djojoadingrat termasuk

---

<sup>8</sup> Anom wani wicaksana, *Raden Ajeng Kartini Perempuan Pembawa Cahaya untuk Bangsa*. (Yogyakarta: C-Klik Media, 2018), hlm. 5

<sup>9</sup> Anom wani wicaksana, op. cit., hlm. 14.

<sup>10</sup> Anom wani wicaksana, op. cit., hlm. 29.

bangsawan yang berpikiran modern. Djojoadingrat memahami keinginan Kartini, sehingga memberikan kebebasan dan mendukungnya untuk mendirikan sekolah khusus wanita yang terletak di sebelah timur pintu gerbang kompleks pendopo kadipaten Rembang.<sup>11</sup>

Bagi Kartini, pendidikan adalah salah satu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah yang modern.<sup>12</sup> Selain itu, ia juga berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang membentuk kepribadian peserta didik sehingga mereka mampu menyaring budaya asing, memberdayakan segi positifnya dan meninggalkan segi negatifnya tanpa menghilangkan karakter sendiri.<sup>13</sup>

Sebelum menikah dengan bupati Djojoadingrat dan mendirikan sekolah di Rembang, sekolah pertama Kartini pertama kali dibuka bersama Rukmini pada tahun 1903. Sekolah ini dikhususkan untuk wanita. Setelah Kartini wafat, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan Sekolah Wanita pada 1912. Yayasan Kartini sendiri didirikan oleh Van Deventer yang merupakan seorang tokoh Politik Etis di era kolonialisme Belanda.<sup>14</sup>

Pada 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 Tahun 1964 yang menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.<sup>15</sup> pemerintah juga menetapkan hari lahir Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, sebagai hari besar nasional yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.

## **2. Tokoh Wanita yang Berpengaruh Masa Orde Baru**

### **b. Siti Hartinah Soeharto**

Ibu Siti Hartinah Soeharto atau Ibu Tien Soeharto merupakan ibu negara kedua sekaligus istri dari Preside Soeharto. Ibu Tien muda hidup dalam keluarga yang berpergang pada aturan budaya Jawa yang kuat, namun masih memiliki beberapa kelonggaran, salah

---

<sup>11</sup> Anom wani wicaksana, *op.cit.*, hlm. 32-33.

<sup>12</sup> Karlina Hudaidah, "Pemikiran Pendidikan dan Perjuangan Raden Ayu Kartini untuk Perempuan Indonesia", *Jurnal Humanitas*, vol. 7 no. 1, Desember 2020, hlm. 40.

<sup>13</sup> Anom wani wicaksana, *op. cit.*, hlm. 55.

<sup>14</sup> Anom Wani Wicaksana, *op. cit.*, hlm. 44.

<sup>15</sup> Anom Wani Wicaksana, *op. cit.*, hlm. 44.

satunya adalah masih memperbolehkan Ibu Tien untuk bersekolah dan melaksanakan kegiatan lain seperti bergabung pada aktivitas JPO (*Javaansche Padvinder Organisatie*)<sup>16</sup>.

Pada masa kependudukan Jepang di kota Solo, dibentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, salah satunya dan satu-satunya organisasi wanita bentukan Jepang pada masa itu adalah *Fujinkai*<sup>17</sup>. Ibu Tien muda merupakan salah seorang pemudi Solo yang setelah mendapatkan izin dari ayahnya, bergabung dengan organisasi *Fujinkai* ini.<sup>18</sup>

Ibu Tien muda juga bergabung dalam organisasi Barisan Pemuda Putri Indonesia yang didirikan oleh Nyonya Darmoyono. Pada 11 Oktober 1945, lahirlah sebuah badan perjuangan yang bernama Laskar Putri Indonesai (LPI). Ibu Tien muda bertugas dalam unsur staf yang mengendalikan keperluan perlengkapan maupun logistik yang sangat diperlukan oleh pasukan yang masih bertempur pasca Kemerdekaan Indonesia pada saat itu.

Soeharto yang merupakan anak angkat dari keluarga Prawirohardjo menikahi Ibu Tien muda pada saat itu. Keduanya menikah pada tanggal 26 Desember 1947 dan dikaruniai enam orang anak.<sup>19</sup> pada tahun 1967, status ibu Tien yang sebelumnya hanyalah istri

---

<sup>16</sup> JPO atau *Javaansche Padvinder Organisatie* merupakan organisasi pramuka pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Mangkunegara VII pada tahun 1916. dari JPO ini memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis salah satunya seperti Hizbul Wahton (HM) pada 1918. Namun melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, akhirnya Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah *Padvinder*. <https://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id/sejarah-pramuka-di-indonesia/> (diakses pada hari selasa, 6 Juli 2021, pukul 21.59 wib)

<sup>17</sup> Fujinkai merupakan organisasi barisan wanita yang didirikan oleh Jepang pada Agustus 1943. Fujinkai selain beranggotakan kaum ibu, fujinkai juga beranggotakan para gadis yang berusia di atas 15 tahun. Tugas fujinkai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan masyarakat. Anggota fujinkai dilatih membuat dapur umum dan pertolongan pertama. Anggota fujinkai juga melakukan kinroshi atau kerja bakti wajib tanpa upah. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/180000469/fujinkai-barisan-wanita-bentukan-jepang> (diakses pada rabu, 7 Juli 2021, pukul 7.45 wib.)

<sup>18</sup> Abdul Gafur, *Siti Hartinah Soeharto Ibu Utama Indonesia*. (Jakarta: PT. Citro Lamtoro Agung Persada, 1993), hlm. 97

<sup>19</sup> [https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/family/?box=detail&id=1&from\\_box=list&hlm=1&search\\_ruas=&search\\_keyword=&activation\\_status=&presiden\\_id=2&presiden=suharto](https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/family/?box=detail&id=1&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=2&presiden=suharto) (diakses pada hari Jumat, 9 Juli 2021, pukul 23.55 wib)

seorang prajurit berubah menjadi ibu negara bersamaan dengan diangkatnya Mayjend Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua serta sebagai pemegang mandat MPRS pada saat itu.<sup>20</sup>

Kelengkapan busana bu Tien merupakan ciri khusus yang juga memberikan identitas pada pemakainya yang meliputi fungsi dan perannya sebagai Ibu Negara yang juga merupakan ikon wanita pada masa Orde Baru.<sup>21</sup> Waktunya disibukkan dalam aktivitasnya dalam pembinaan dua organisasi yang didirikannya yaitu Ikatan Keluarga Staf Hankam dan Rukun Ibu Ampera. Ibu Tien juga berupaya memantapkan organisasi Dharma Wanita pada saat itu. Ibu Tien Soeharto juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan kenegaraan. Ibu Tien juga ikut mengkampanyekan program Keluarga Berencana kepada masyarakat luas.<sup>22</sup>

Selain aktif dalam kegiatan kenegaraan, Ibu Tien Soeharto juga aktif dalam menggalakan beberapa proyek besar. Pada bulan Maret 1971, dalam rapat pleno pengurus Yayasan Harapan Kita, gagasan mengenai pembangunan TMII ini dilontarkan oleh Ibu Tien.<sup>23</sup> Pada 1975, kompleks TMII secara resmi dibuka oleh Ibu Tien Soeharto.

Proyek besar lain dari gagasa Ibu Tien Soeharto adalah pembangunan dan pemugaran Perpustakaan Nasional. Pada 8 Desember 1985 Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara dalam upacara tradisional yang sederhana menanam kepala kerbau sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung Perpustakaan Nasional. Diperlukan beberapa bulan untuk memboyong dan memindahkan isi perpustakaan dari Museum Pusat dan dari Jln. Merdeka Selatan.<sup>24</sup>

#### c. Julia Suryakusuma

Julia Suryakusuma merupakan aktifis yang lahir di New Delhi, India. Setelah menyelesaikan SMA di Jakarta, Julia melanjutkan kuliah di fakultas Psikologi, Universitas

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Erika Yustanti, *Ibid.*, hlm 568-570

<sup>22</sup> Abdul Gafur *op. cit.*, hlm. 268-312.

<sup>23</sup> Abdul Gafur, *op. cit.*, hlm. 384

<sup>24</sup> Abdul Gafur, *op. cit.*, hlm. 430

Indonesia. Pada kisaran tahun 1976 – 1979, Julia menempuh studi Sosiologi di City University, Landon. Ia berhasil merai gelar bsc. Honours. Lalu ia melanjutkan ke jurusan Politik Masyarakat Berkembang di Insitute Of Social Studies, Den Haag, Belanda, serta mendapatkan gelar msc.

Julia mengawali karir menulisnya pada tahun 1971. Tulisan-tulisan Julia dimuat diberbagai penerbitan seperti kompas, tempo, prisma, dan lain sebagainya. Tulisanya juga dimuat oleh penerbit luar negeri seperti International Herald Tribune, Singapore Straits Times, Daily Yomiuri, The Australian, NRC Handlesblaad, dan lain sebagainya. Julia menjadi aktivis sejak masa Orde Baru, namun kesempatan lebih terbuka lebar pada masa Reformasi dengan menjadi anggota – pendiri Suara Ibu Peduli (SIP) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).<sup>25</sup>

Pada awal Reformasi, Julia mendirikan Yayasan Almanak Politik Indonesia (API). Tulisannya di majalah Prisma pada 1981 dan 1991, menjadi dasar bidang baru di Indonesia, yakni studi jender dan seksualitas yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>26</sup> Karya akademisnya yang dianggap paling penting adalah tesisnya yang berjudul “State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia”. Sejak 2006, Julia secara rutin menulis di koran the jarakta pos, di tempo edisi Bahasa Inggris, dan di majalah Garuda Indonesia.<sup>27</sup>

Karya penting Julia Suryakusuma yang dibukukan dengan judul “Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru” merupakan karya yang membahas tentang ideologi Ibuisme Negara. Ibuisme merupakan paham yang menempatkan kaum wanita sebagai pekerja domestik tanpa dibayar demi mendukung kapitalisme negara. Kontrol atas kaum wanita dilakukan dengan upaya mendefinisikan peran ideal perempuan sebagai ibu

---

<sup>25</sup> [https://komunitasbambu.id/?mas\\_static\\_content=julia-suryakusuma](https://komunitasbambu.id/?mas_static_content=julia-suryakusuma) (diakses pada Sabtu, 21 Agustus 2021, pukul 20.21 wib)

<sup>26</sup> *Ibid.*,

dan istri.<sup>28</sup> Seluruh proses domestikasi ini jelas bukan demi kemajuan kaum wanita, tetapi demi “ketertiban”, “pembinaan”, dan “stabilitas” negara.<sup>29</sup>

### 3. Wanita dalam budaya Jawa

#### a. Jawaisme

Kata wanita dalam bahasa Jawa berasal dari tembung camboran, yaitu dari *wani ing tata*. Menurut pandangan budaya Jawa, wanita diharuskan dapat memahami, memaknai, dan melakukan *Ma Telu* atau 3M yang berarti Masak, Manak, dan Macak.<sup>30</sup>

Definisi lain mengenai wanita dijelaskan pula dalam salah satu novel berjudul *Hati Suhita*. Dalam novel ini dijelaskan bahwa kekuatan wanita berada pada Tapa-Tapak-Telapak. Sekaligus menggambarkan bahwa sesungguhnya di bawah telapak wanitalah eksistensi dan esensi surga berada, dimana hal ini berhubungan dengan ungkapan “surga berada dibawah telapak kaki ibu”.<sup>31</sup>

#### b. Mode busana wanita Jawa masa Orde Baru

Model busana nasional Indonesia adalah model busana kebaya yang dikenakan oleh Ibu Kepala Negara Republik Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu Ibu Tien Soeharto.<sup>32</sup> Namun, di masa Orde Baru, kebaya menggambarkan pengekangan dari kebebasan wanita<sup>33</sup>. Pada masa Orde Baru pula, kebaya dijadikan sebagai alat politik dengan menjadikan kebaya sebagai seragam atau busana resmi wajib yang dikenakan oleh rakyat kalangan kelas menengah dan keluarga pegawai. Perjuangan Kartini melawan penindasan kaum wanita menjadi disederhanakan berupa Kebaya Kartini.<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Penerbit Cakrawala, 2003), hlm, 56.

<sup>31</sup> Khilma Anis, *Hati Suhita*, (Yogyakarta : Telaga Aksara, 2019), hlm. 16.

<sup>32</sup> Suciati, dkk., "Nilai Feminitas Indonesia dalam Desain Busana Kebaya Ibu Negara", *Ritme*, vol. 1 no. 1, Agustus 2015, hlm. 54.

<sup>33</sup> Kathryn Robinson, “Wanita: Dikotomi versus Keragaman”, dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 433.

<sup>34</sup> <https://publika.rmol.id/read/2021/04/10/482884/politik-kebaya-dan-perempuan>

Dari mode pakaian wanita pada masa Orde Baru ini dapat dilihat dan diketahui bahwa pakaian kebaya yang menjadi busana nasional yang merupakan simbol gambaran keanggunan dan kerapian wanita. Busana kebaya wanita memiliki makna lain yang tanpa disadari menggambarkan ketidakbebasan dan terkekangnya wanita dengan disimbolkan dalam busana wanita yang dipakai dengang ketat dan menyulitkan wanita untuk berjalan dan beraktivitas.

#### 4. Wanita masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru wanita tidak hanya dipetakan oleh adat istiadat budaya, tetapi juga oleh kebijakan-kebijakan yang disusun dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai wanita, maka dapat terlihat bahwa Orde Baru tidak hanya mengatur mengenai hal kenegaraan, tetapi mengatur peran hingga pada ranah pribadi setiap individu wanita.

Wanita diawasi dengan disatukan dalam satu wadah organisasi yang dibentuk langsung oleh pemerintah atas prakarsa dari Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara. Dua diantara banyaknya organisasi, pada masa itu adalah Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Selama masa Orde Baru, peranan wanita terlihat pada berjalannya dua proyek besar pemerintah pada saat itu. Adapaun dua proyek tersebut adalah Keluarga Berencana atau KB dan Industrialisasi yang menargetkan kaum wanita.<sup>35</sup>

- a. Organisasi Wanita masa Orde Baru
  - a) Dharma Wanita

Dharma Wanita resmi didirikan pada 5 Agustus 1974.<sup>36</sup> Organisasi Dharma Wanita atau DW ini bersifat wajib bagi seluruh istri Pegawai Negeri. DW dikerahkan untuk berpartisipasi dalam fungsi-fungsi resmi dan menangani pekerjaan pencarian dana dalam pelayanan pembangunan Nasional.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*, (Depok: Komunitas Bambu, 2011). Hlm. 20.

<sup>37</sup> Kathryn Robinson, "Wanita: Dikotomi Versus Keragaman", dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 435

Masa Orde Baru, negara sering menampilkan cirinya sebagai keluarga yang tercetus dalam paham kekeluargaan atau famili-isme. Salah satu dari famili-isme adalah konstruksi perempuan pada masa Orde Baru yaitu ibuisme negara. Dharma Wanita merupakan perwujudan konkret dari ibuisme negara. Perwujudan tersebut tergambarkan pula pada Panca Dharma Wanita.<sup>38</sup>

Anggota maupun pemimpin DW berusaha menggunakan DW dan stempel remisnya untuk melindungi diri dan mengurangi adanya resiko bagi mereka yang berupa ketidakadilan. Pada 1981, DW meminta kepada Presiden Soeharto untuk dibuatkan Undang-Undang Khusus guna melindungi para istri PNS dari praktik poligami serta perceraian yang semena-mena. Hal ini akhirnya ditanggapi oleh Soeharto dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.10 Tahun 1983.<sup>39</sup>

Di dalam DW terdapat implikasi-implikasi dari ideologi, politik, sosial dan strategi pada masa Orde Baru. Secara ideologi, DW berusaha membuat kaum wanita untuk mengikuti model ibuisme negara dan budaya “ikut suami”. Dalam kebudayaan, DW menjadi perantara antara Jawanisasi atau Jawaisme dengan Priyayisasi. Dalam ranah politik, DW bernada militerisasi dan patrenalistis. Dalam bidang sosial, DW mengharuskan wanita untuk “sukarela bekerja tanpa imbalan” untuk mendukung kegiatan-kegiatan negara.<sup>40</sup>

Selama masa pemerintahan Orde Baru, terdapat empat orientasi Dharma Wanita. Pertama, dalam orientasi politik, DW diharuskan melakukan kampanye sebelum pemilu. Kedua, dalam orientasi pembangunan, Dharma Wanita merupakan kekuatan politik terbesar untuk pemerintah. Ketiga, orientasi penyalur aspirasi istri pegawai negeri sipil. Dan keempat, dalam orientasi umum, Dharma Wanita bersifat pergaulan bagi anggotanya.<sup>41</sup>

#### b) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

---

38           Ibid.,

39           Ibid.,

40           Julia Suryakusuma, *op.cit.*, hlm. 23.

41           Siti Fatimah, *op.cit.*, hlm. 249.

PKK merupakan lembaga perantara tunggal antara negara dengan kaum wanita desa.<sup>42</sup> Jika istri para pegawai negeri sipil bergabung dalam Dharma Wanita, wanita-wanita pedesaan di Indonesia bergabung dalam PKK.<sup>43</sup> PKK merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1957, sebagai program pendidikan dengan tujuan kesejahteraan keluarga.<sup>44</sup>

Pada pertengahan dasawarsa tahun 1960-an, Ibu Munadi yang merupakan istri dari Gubernur Jawa Tengah saat itu memelopori pelaksanaan PKK sebagai bagian dari usaha pembangunan daerah.<sup>45</sup> Dalam aspek ideologi, PKK menganut Panca Dharma Wanita.<sup>46</sup> pemerintah telah merumuskan dan Menyusun seperangkat kegiatan yang cukup kompleks. Sepuluh program pokok PKK disusun dengan berisi sebagai berikut: program pertama mengenai P4 yang merupakan kependekan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang mana program ini menentukan alur program-program lain yang sifatnya lebih teknis tetapi notabenejanya sejalan dengan upaya pembangunan pemerintah, selain itu dalam program ini diterapkan adanya penataran-penataran ideologi negara.<sup>47</sup>

Program kedua dari PKK mengenai gotong royong merupakan konsep ideal yang digunakan oleh pemerintah sebagai sarana memobilisasi penduduk untuk menjalankan program-program pemerintah, dalam pengaplikasian program ini lebih menuntut rakyat untuk siap membantu pemerintah setiap saat pemerintah membutuhkan.<sup>48</sup>

Program ketiga adalah mengenai gizi, dimana program ini merupakan salah satu program PKK yang bertujuan menanamkan kesadaran tentang pentingnya makanan yang sehat dan bergizi, dalam pengaplikasiannya dilakukan pelatihan masak-memasak

---

<sup>42</sup> Julia Suryakusuma, *op.cit.*, hlm. 27

<sup>43</sup> Kathryn Robinson, *op.cit.*, hlm. 437-438

<sup>44</sup> Julia Suryakusuma, *op.cit.*, hlm 27-28

<sup>45</sup> Saskia E. Wieringa, *Kuntilanak Wangi Organisasi-organisasi Perempuan Indonesia sesudah 1950*, (Jakarta: Kalyanamitra, 1999), hlm. 14-15

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>47</sup> Julia Suryakusuma, *op.cit.*, hlm. 38

<sup>48</sup>

serta pengarahan dengan kepada wanita dan ibu-ibu mengenai makanan dengan gizi yang cukup untuk keluarga.<sup>49</sup>

Program keempat mengenai sandang ditujukan untuk memberikan pengertian mengenai fungsi dan cara berpakaian yang sesuai dengan kepribadian, usia, dan keadaan. Program kelima dari PKK adalah rumah dan tata laksana rumah tangga, program PKK yang berkaitan dengan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan rumah sebagai tempat tinggal keluarga yang dimana program ini juga bertujuan untuk membantu menanamkan gagasan mengenai “rumah sehat” dengan kriteria seperti ventilasi dan penyaliran yang baik, penempatan perabotan yang benar, dan lain sebagainya yang sekiranya cocok sebagai tempat tinggal yang ditempati oleh “Keluarga Pancasila”.<sup>50</sup>

Program keenam PKK adalah pendidikan dan keterampilan merupakan program PKK yang memusatkan pada pengasuhan dan pendidikan anak serta pendidikan kaum wanita agar menjadi sosok ibuk yang baik dan diharapkan dapat memahami apa yang disebut pengetahuan umum seperti kewarganegaraan, serta dalam program ini hakikatnya ditujukan untuk mendukung program pembangunan pemerintah dan melatih penduduk desa agar menjadi warga negara yang baik.<sup>51</sup>

Program ketujuh adalah mengenai kesehatan PKK diminta untuk mensukseskan program-program pembangunan pemerintah dalam bidang kesehatan seperti Keluarga Berencana dan Posyandu. Program kedelapan adalah pengembangan koperasi menjadi salah satu program yang mengikutsertakan lembaga ekonomi yang dianggap paling cocok dengan “pemerataan Pancasila,” berdasarkan “asas kekeluargaan” dan semangat “gotong royong”.<sup>52</sup>

Program kesembilan mengenai lingkungan merupakan perkembangan program PKK setelah dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup pada 1979. Dan Program

---

50 Julia Suryakusuma, *op.cit.*, hlm. 39

51 Julia Suryakusuma, *op.cit.*, hlm. 39-40

52 Julia Suryakusuma, *op.cit.*, hlm. 40

kesepeuluh PKK merupakan program mengenai perencanaan rumah tangga yang baik, berkaitan dengan adanya pembagian tugas di rumah, manajemen keuangan.<sup>53</sup>

Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan, PKK juga ikut serta dalam mengkampanyekan program Keluarga Berencana yang juga diadakan oleh Pemerintah pada masa itu.<sup>54</sup> PKK sangatlah berarti pada masa Orde Baru, hal demikian dikarenakan PKK merupakan sarana untuk menyalurkan program-program pemerintah untuk kaum wanita dan badan perantara antara negara dengan kaum wanita desa.<sup>55</sup>

#### **b. Keluarga Berencana (KB)**

Prioritas program KB telah ditetapkan pada awal masa Orde Baru. Pada 1968, Presiden Soeharto membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Menjelang tahun 1976, layanan kontrasepsi disediakan dengan gratis untuk 2.700 klinik, dan dengan demikian tingkat kehamilan pada wanita usia muda mulai menurun secara signifikan, terutama pada wilayah dengan padat penduduk seperti Jawa dan Bali.<sup>56</sup>

Pada 1991, wanita yang telah menikah diminta untuk melaporkan cara KB yang digunakan bersama suami. Di Soroako yang merupakan kota pertambangan, setiap wanita yang telah melahirkan akan dikunjungi oleh seorang staf proyek. Kunjungan ini seringkali berakhir dengan penyuntikan wanita tersebut dengan obat kontrasepsi untuk jangka panjang yang disebut Depovera.<sup>57</sup>

#### **c. Industrialisasi wanita**

Semasa kepemimpinan Orde Baru, Indonesia membuka lebar kesempatan bagi asing untuk berinvestasi, salah satunya di bidang penggalian sumber-sumber alam. Hal ini menimbulkan pula maraknya pembukaan pabrik-pabrik di pedesaan dan mempekerjakan kaum wanita untuk bekerja di pabrik-pabrik tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>53</sup> Julia Suryakusuma, *op.cit.*, hlm. 40  
<sup>54</sup> Saskia E. Wieringa, *op.cit.*, hlm. 15  
<sup>55</sup> Kathryn Robinson, *op.cit.*, hlm. 440  
<sup>56</sup> Kathryn Robinson, *op.cit.*, hlm. 441  
<sup>57</sup> Kathryn Robinson, *op.cit.*, hlm.445-446.  
<sup>58</sup> Kathryn Robinson, *op.cit.*, hlm. 448-449.

Orde Baru menetapkan Upah Minimum Regional atau UMR. Namun, dalam sektor perindustrian menunjukkan bahwa tenaga kerja wanita tidak menerima upah sebesar yang telah ditetapkan dalam UMR. Menurut undang-undang, pekerja wanita berhak mendapatkan cuti menstruasi dan cuti hamil. Namun dalam praktiknya, tunjangan dan cuti menstruasi sangat jarang diberikan.<sup>59</sup>

Dibalik semakin maraknya modal asing yang masuk ke Indonesia pada masa Orde Baru, serta semakin banyaknya wanita yang tidak sadar bahwa dirinya hanya dieksploitasi.<sup>60</sup> Tidak jarang para wanita muda mencari pekerjaan di bidang industri tanpa mempedulikan upah yang rendah. Dengan adanya proyek industrialisasi wanita, wanita sangat berperan penting sehingga memberikan dampak pada terbukanya investasi dari pihak asing ke Indonesia secara besar-besaran.

##### **5. Dampak nilai karakter wanita masa Orde Baru**

Pendidikan karakter merupakan sebuah inovasi pendidikan untuk mengatasi permasalahan karakter di Indonesia, serta sebagai bentuk reformasi pendidikan yang perlu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar, agar tercapai pembelajaran yang bermakna.<sup>61</sup>

Salah satu nilai karakter adalah nilai nasionalis. Dalam nilai karakter nasionalis terdapat subnilai, salah satunya adalah rela berkorban. Pada masa Orde Baru dapat dilihat dari proyek pemerintah, Industrialisasi Wanita, dengan karakter rela berkorbannya demi keluarga dan kesejahteraan hidupnya menjadikan program ini berjalan dengan baik dikarenakan wanita menjadi sasaran tenaga kerja baru bagi perusahaan-perusahaan asing, wanita juga dituntut untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara tanpa adanya imbalan yang akan didapatkan.

Dampak negatif dari adanya sikap rela berkorban adalah secara tidak langsung wanita dieksploitasi untuk dijadikan tenaga kerja dengan upah yang sangat rendah. Subnilai lain dari karakter nasionalis adalah disiplin. Kehidupan wanita Jawa lebih teratur dan disiplin karena

---

<sup>59</sup> Kathryn Robinson, op.cit., hlm. 451

<sup>60</sup> Julia Suryakusuma, "Laporan Khusus: Perempuan Kebun Karet", majalah Prisma, Nomor 2, 1986, hlm. 79.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

kebiasaan yang telah diterapkan di keluarga sejak dini. Kedisiplinan yang melekat menjadikan wanita menjadi sasaran proyek industrialisasi.

Mandiri merupakan salah satu nilai karakter yang juga memiliki beberapa subnilai. Salah satu subnilai dari karakter mandiri adalah etos kerja atau kerja keras. Etos kerja yang dimiliki wanita pada masa Orde Baru menjadikan mereka banyak dicari oleh perusahaan. Salah satu perlakuan semena-mena pada tenaga kerja wanita oleh perusahaan adalah upah yang rendah namun beban kerja hampir sama dengan laki-laki bahkan lebih, tidak diberikannya hak cuti menstruasi dan cuti hamil.<sup>62</sup>

Selain nilai-nilai karakter yang telah disebutkan, salah satu nilai karakter yang melekat pada wanita adalah kepatuhan. Banyak mereka dengan patuh mengikuti program yang telah ditetapkan oleh pemerintah masa Orde Baru.

#### **D. Kesimpulan**

1. Konsep tradisional Jawa yang menganggap bahwa wanita adalah makhluk kelas dua, di bawah laki-laki dan memiliki kodrat yang terbatas atas dirinya sendiri seperti pepatah Jawa yang berbunyi, '*wanita iku yen awan dadi theklek, lha yen bengi dadi lemek*' menunjukkan bahwa perempuan jika siang jadi alas kaki bagi laki-laki, sedangkan saat malam menjadi alas tidur bagi laki-laki. Adanya anggapan bahwa perempuan hanya terbatas pada pekerjaan domestik saja, yaitu *macak* (berhias diri), *manak* (melahirkan), dan *masak* (di dapur) telah membuat perempuan dalam posisi yang terkekang. Dalam penelitian ini kemudian dibahas mengenai perubahan-perubahan yang ada seiring berjalannya waktu bahwa wanita tidak lagi menjadi seseorang yang dapat direndahkan karena wanita pun mampu bergerak dan berdaya mengimbangi peran laki-laki yang semula dianggap lebih unggul.
2. Adapun Tokoh Wanita sebelum Orde Baru yaitu Martha Christina Tiahahu, Cut Nyak Din, dan R.A Kartini. Wanita-wanita tersebut adalah pejuang emansipasi yang membuat banyak perubahan dan berpengaruh hingga masa kini. Marta Tiahahu yang pemberani berusaha memperjuangkan hak dan kebebasannya meskipun harus turut terjun di medan perang yang

---

<sup>8</sup> Kathryn Robinson, "Wanita : Dikotomi Versus Keragaman", dalam Donald K. Emmerson (ed.), Indonesia Beyond Soeharto. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 450-451.

berbahaya. Begitu juga dengan Cut Nyak Din dengan kepintarannya dalam membuat strategi dapat membantu mengkoordinasi pejuang Aceh melawan Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa wanita juga memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga dapat menjalankan peran dengan baik yang sama pentingnya dengan keberadaan laki-laki. Wanita yang sangat berpengaruh berikutnya adalah Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan pendidikan bagi wanita sehingga wanita tidak terdiskriminasi untuk bersekolah dan melanjutkan profesinya sebagai seseorang yang kompeten secara keilmuan serta memiliki budi pekerti yang baik. Wanita yang berpendidikan dan dapat memanfaatkan ilmunya dengan baik akan menciptakan generasi penerus yang lebih baik di masa depan. Ada pula tokoh wanita yang berpengaruh pada masa Orde Baru yaitu Siti Hartinah yang merupakan istri dari Presiden Soeharto. Beliau adalah ibu negara yang aktif berorganisasi dan membantu urusan kenegaraan bersama dengan suaminya. Sedangkan Julia Suryakusuma adalah aktivis perempuan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap berkembangnya media masa seperti surat kabar yang memuat study gender dan kenegaraan oleh wanita.

3. Eksistensi Budaya Jawa Pada Masa Orde Baru, didahului dengan Masa Orde Lama yang tidak lepas dari tokoh-tokoh perempuan yaitu Hartini, Fatmawati, dan Naoko Nemoto yang ketiganya adalah istri dari Presiden Soekarno. Masing-masing memiliki peran yang amat besar seiring dengan perkembangan Indonesia menuju masa revolusi hingga merdeka.

Budaya Jawa yang terbentuk direpresentasikan sebagai kodrat wanita yang sesungguhnya. Jawaisme, merupakan salah satu paham untuk mempopulerkan simbol, pelajaran, dan identitas bagi Bangsa Indonesia.

Wanita Masa Orde Baru berdasarkan kebijakan-kebijakan yang disusun dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Adapun lima bentuk partisipasi tersebut adalah *pertama*, wanita dijelaskan dalam bentuk kodrat yang berbeda dengan laki-laki. *Kedua*, wanita dapat memilih perannya dalam proses pembangunan tanpa harus meninggalkan posisinya sebagai ibu rumah tangga. *Ketiga*, wanita dapat dilihat sebagai pemegang peran

penting dalam rumah tangga. *Keempat*, wanita baik yang tinggal di kota maupun di desa harus terlibat dalam memecahkan permasalahan nasional. *Kelima*, kerja wanita sangat berkaitan dengan pembangunan, terutama berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan keterampilan. Tokoh-tokoh wanita di atas lah yang mencetuskan kesetaraan bagi kaum wanita sehingga wanita juga dapat bergerak aktif berorganisasi seperti Dharma Wanita, PKK, dan mendapatkan keadilan dalam Program KB, ataupun Industrialisasi Wanita.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Anis, K. (2019). *Hati Suhita*. Jember: Telaga Aksara.
- Endraswara, S. (2003). *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang: Cakrawala.
- Fatimah, S. (n.d.). Wacana Gender dan Gerakan Perempuan. In *Indonesia dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi* (p. 240). Ichtiar Baru van Hove,.
- Gafur, A. (1993). Siti Hartinah Soeharto : Ibu Utama Indonesia. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Robinson, K. (2001). Wanita : Dikotomi versus Keragaman. In D. K. Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto* (pp. 419-462). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Stuers, C. V.-D. (2017). *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.
- Suryakusuma, J. (2011). *Ibuisme Negara : Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu.
- Wicaksana, A. W. (2018). *Raden Ajeng Kartini : Perempuan Pembawa Cahaya untuk Bangsa*. Yogyakarta: C-Klik Media.
- Wieringa, S. E. (1998). *Kuntulanak Wangi Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia sesudah 1950*. Jakarta: Kalyanamitra.

#### Jurnal

- Budiati, A. C. (2010). Aktualisasi Diri Perempuan Dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan terhadap Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri). *Pamator*, 51-58.
- Hudaidah, K. (2020). Pemikiran Pendidikan dan Perjuangan Raden Ayu Kartini untuk Perjuangan Indonesia. *Humanitas*, 40.

Suciati, dkk. (2015). Nilai Feminitas Indonesia dalam Desain Busana Kebaya Ibu Negara. *Ritme*, 54.

Suryadi, M. (2019). Potret Kekuatan Perempuan Jawa dalam Bingkai Peralatan Tradisional Masyarakat Jawa Pesisir Melalui Analisis Peran Semantis. *Nusa*.

Yuastanti, E. (2016). Gaya Busana Siti Hartinah Soeharto sebagai Ibu Negara Indonesia Tahun 1968-1996. *Avatara E-Journal*.

### **Majalah**

Julia Suryakusuma. (1986). *Laporan Khusus: Perempuan Kebun Karet*. Majalah Prisma.

### **Website**

Wildan. (2020, Agustus 13). *Sejarah Pramuka di Indonesia*. Retrieved from Museum Sumpah Pemuda: <https://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id/> (diakses pada hari Selasa, 6 Juli 2021, pukul 21.59 wib)

Nailufar, N. N. (2020, Januari 14). *Fujinkai, Barisan Wanita Bentuk Jepang*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/180000469/fujinkai-barisan-wanita-bentukan-jepang> (diakses pada Rabu, 7 Juli 2021, pukul 7.45 wib.)

